



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DALAM KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun dan Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Dusun Perubahan Kepada Camat (Berita Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Dusun Setiap Dusun Dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah sebelumnya telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening kas umum Daerah.
 - (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam pemindahbukuan dari Rekening kas umum daerah ke rekening kas dusun.
 - (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan maret dan paling lambat bulan juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam menyalurkan Dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas dusun Kepala DPMD mengeluarkan surat rekomendasi penyaluran Dana Desa terhadap dusun yang bersangkutan.
- (2) Surat Rekomendasi untuk penyaluran Dana Desa tahap I diberikan setelah Rio menyampaikan peraturan dusun tentang APBDus dan laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan pencapaian output Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Surat Rekomendasi untuk penyaluran Dana Desa tahap II diberikan setelah Rio menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan pencapaian output tahap I.
- (4) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan pencapaian output tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit Dana Desa tahap I telah diserap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan pencapaian output paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (5) Peraturan Dusun tentang APBDus serta laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan pencapaian output tahap I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus disampaikan kepada Kepala DPMD dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bungo.

- (7) Rincian penggunaan Dana Desa yang diterima dusun setiap tahun dianggarkan dalam APBDus.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rio menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan pencapaian output setiap tahap kepada Bupati u.p. Kepala DPMD, dengan format laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan pencapaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan pencapaian output Tahun Anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan; dan
 - laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan pencapaian output tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan;
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
- Rio belum menyampaikan Perdes tentang APB Dusun; dan/atau
 - Rio belum menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan pencapaian output tahap sebelumnya; dan/atau
 - terdapat SiLPA Dana Desa melebihi 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran yang dikarenakan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sampai dengan dikeluarkannya surat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah agar Dana Desa kembali disalurkan.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dusun yang terdapat SiLPA melebihi 30% (tiga puluh perseratus) berupa :
- meminta penjelasan kepada Rio mengenai SiLPA Dana Desa tersebut;
 - meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

5. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

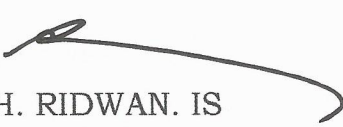
Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 - 8 - 2017


BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 - 8 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN. IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR ...27

TELAUDIPERIKSA KENAKARANNYA		
KASUBAG PUU	KABAG. HUKUM	SEKRETARIS
TGL 26/8	TGL 14/8	TGL
NIP.	NIP.	NIP.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN :	
KASUBAG PUU	KABAG. HUKUM
TGL 	TGL 
HAMEALI, SH NIP. 19760415 200212 1 005	ALEK PURWENDI, SH.MH NIP. 19730726 200003 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR **27** TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2017

RINCIAN DANA DESA
SETIAP DUSUN DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

No.	KECAMATAN	DUSUN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH / (KURANG)
1	2	3			
1	BATHIN III	Lubuk Benteng	748,253,164	755,658,000	7,404,836
2		Air Gemuruh	765,259,237	777,160,000	11,900,763
3		Purwo Bakti	749,897,222	764,942,000	15,044,778
4		Sarana Jaya	758,953,064	768,908,000	9,954,936
5		Teluk Panjang	786,232,419	798,070,000	11,837,581
SUB-TOTAL			3,808,595,106	3,864,738,000	56,142,894
1	MUKO - MUKO BATHIN VII	Mangun Jayo	764,479,085	778,379,000	13,899,915
2		Tanjung Agung	810,979,825	821,019,000	10,039,175
3		Tebat	759,412,292	771,467,000	12,054,708
4		Baru Pusat Jalo	754,366,132	766,031,000	11,664,868
5		Bedaro	815,758,903	825,884,000	10,125,097
6		Tebing Tinggi	776,671,986	778,100,000	1,428,014
7		Datar	748,963,578	749,607,000	643,422
8		Suka Jaya	739,725,262	752,735,000	13,009,738
9		Pekan Jum'at	751,467,824	757,870,000	6,402,176
SUB-TOTAL			6,921,824,887	7,001,092,000	79,267,113
1	JUJUHAN	Tanjung Belit	794,901,574	773,361,000	(21,540,574)
2		Rantau Ikil	802,238,781	782,519,000	(19,719,781)
3		Pulau Jelmu	781,560,209	773,206,000	(8,354,209)
4		Sirih Sekapur	805,919,375	788,720,000	(17,199,375)
5		Ujung Tanjung	807,939,925	794,627,000	(13,312,925)
6		Jumbak	766,328,956	757,900,000	(8,428,956)
7		Rantau Panjang	786,511,081	763,434,000	(23,077,081)
8		Talang Pamesun	773,809,455	761,619,000	(12,190,455)
9		Sirih Sekapur Perkembang	772,280,561	773,368,000	1,087,439
10		Baru Balai Panjang	763,245,997	765,376,000	2,130,003
SUB-TOTAL			7,854,735,914	7,734,130,000	(120,605,914)
1	TANAH SEPENGAL	Teluk Pandak	766,179,118	770,843,000	4,663,882
2		Empelu	766,635,429	772,826,000	6,190,571
3		Tanah Bekali	767,321,818	778,600,000	11,278,182
4		Pasar Lubuk Landai	780,413,088	781,217,000	803,912
5		Sungai Gambir	823,315,061	832,882,000	9,566,939
6		Candi	816,652,288	812,589,000	(4,063,288)
7		Tanjung	821,031,977	820,651,000	(380,977)
8		Pasar Rantau Embacang	772,435,152	779,654,000	7,218,848

No.	KECAMATAN	DUSUN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH / (KURANG)
1	2	3			
1	BATHIN II BABEKO	Tanjung Menanti	748,795,537	762,063,000	13,267,463
2		Simpang Babeko	755,777,641	761,709,000	5,931,359
3		Babeko	763,389,486	778,047,000	14,657,514
4		Sepunggur	778,758,812	786,524,000	7,765,188
5		Suka Makmur	739,895,198	747,742,000	7,846,802
6		Tuo Sepunggur	752,027,009	770,858,000	18,830,991
SUB-TOTAL			4,538,643,683	4,606,943,000	68,299,317
1	PELEPAT ILIR	Koto Jayo	770,869,125	781,635,000	10,765,875
2		Danau	784,499,358	807,988,000	23,488,642
3		Muara Kuamang	763,222,586	771,465,000	8,242,414
4		Lubuk	744,672,523	754,419,000	9,746,477
5		Purwasari	813,614,013	806,245,000	(7,369,013)
6		Lembah Kuamang	775,429,445	769,069,000	(6,360,445)
7		Sumber Harapan	793,505,384	782,524,000	(10,981,384)
8		Daya Murni	771,441,650	769,308,000	(2,133,650)
9		Sumber Mulia	766,473,887	753,208,000	(13,265,887)
10		Maju Jaya	765,923,571	765,084,000	(839,571)
11		Tirta Mulya	774,276,445	767,761,000	(6,515,445)
12		Lingga Kuamang	791,536,236	787,042,000	(4,494,236)
13		Bangun Harjo	767,181,614	768,782,000	1,600,386
14		Kuning Gading	763,097,077	766,203,000	3,105,923
15		Kuamang Jaya	746,720,077	759,783,000	13,062,923
16		Karya Harapan Mukti	764,781,304	770,563,000	5,781,696
17		Padang Palangeh	776,227,856	782,127,000	5,899,144
SUB-TOTAL			13,133,472,151	13,163,206,000	29,733,849
1	TANAH SEPENGGAL LINTAS	Sungai mancur	749,864,188	760,793,000	10,928,812
2		Tanah Periuk	781,871,992	789,422,000	7,550,008
3		Lubuk Landai	864,728,872	941,175,000	76,446,128
4		Rantau Embacang	788,301,369	792,232,000	3,930,631
5		Tebing Tinggi	798,691,496	805,605,000	6,913,504
6		Paku Aji	763,805,449	774,596,000	10,790,551
7		Embacang Gedang	756,952,759	763,662,000	6,709,241
8		Sungai Puri	754,741,695	764,480,000	9,738,305
9		Pematang Panjang	752,615,412	764,989,000	12,373,588
10		Sungai Tembang	776,429,660	782,353,000	5,923,340
11		Sungai Lilin	820,502,934	822,855,000	2,352,066
12		Rantau Makmur	763,656,883	773,021,000	9,364,117
SUB-TOTAL			9,372,162,709	9,535,183,000	163,020,291
1	RANTAU PANDAN	Rantau Duku	821,331,597	805,825,000	(15,506,597)
2		Talang Sungai Bungo	788,938,525	798,895,000	9,956,475
3		Rantau Pandan	789,976,528	792,492,000	2,515,472
4		Leban	795,376,123	794,162,000	(1,214,123)
5		Lubuk Kayu Aro	768,711,369	768,340,000	(371,369)

No.	KECAMATAN	DUSUN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH / (KURANG)
1	2	3			
1	BATHIN II PELAYANG	Pelayang	813,671,254	812,676,000	(995,254)
2		Peninjau	774,438,937	777,838,000	3,399,063
3		Talang Silungko	763,217,704	778,164,000	14,946,296
4		Pulau Kerakap	766,474,904	756,855,000	(9,619,904)
5		Seberang Jaya	764,757,874	768,156,000	3,398,126
SUB-TOTAL			3,882,560,673	3,893,689,000	11,128,327
1	TANAH TUMBUH	Pedukun	755,750,154	759,162,000	3,411,846
2		Lubuk Niur	760,729,208	763,452,000	2,722,792
3		Teluk Kecimbung	766,181,758	767,656,000	1,474,242
4		Rambah	757,152,892	762,212,000	5,059,108
5		Tebing Tinggi Uleh	778,609,052	780,829,000	2,219,948
6		Bukit Kemang	783,412,284	778,953,000	(4,459,284)
7		Panjang	762,695,619	764,694,000	1,998,381
8		Koto jayo	754,957,089	758,672,000	3,714,911
9		Renah Jelmu	750,744,298	756,642,000	5,897,702
10		Perenti Luweh	757,766,647	764,029,000	6,262,353
11		Tanah Tumbuh	755,863,041	750,473,000	(5,390,041)
SUB-TOTAL			8,383,862,042	8,406,774,000	22,911,958
1	PELEPAT	Baru Pelepat	812,400,193	766,078,000	(46,322,193)
2		Dwi Karya Bakti	801,012,121	802,826,000	1,813,879
3		Rantau Kelayang	860,800,562	843,100,000	(17,700,562)
4		Balai Jaya	791,697,392	783,129,000	(8,568,392)
5		Rantel	790,819,217	797,173,000	6,353,783
6		Senamat	837,109,939	832,005,000	(5,104,939)
7		Sungai Beringin	784,439,379	809,346,000	24,906,621
8		Sungai Gurun	758,913,082	757,702,000	(1,211,082)
9		Batu Kerbau	878,530,296	828,723,000	(49,807,296)
10		Gapura Suci	805,302,171	789,008,000	(16,294,171)
11		Mulia Bakti	768,062,699	753,073,000	(14,989,699)
12		Mulia Jaya	771,822,677	763,135,000	(8,687,677)
13		Cilodang	769,119,085	757,596,000	(11,523,085)
14		Bukit Telago	754,406,105	788,899,000	34,492,895
15		Sekampil	790,312,214	801,546,000	11,233,786
SUB-TOTAL			11,974,747,132	11,873,339,000	(101,408,132)
1	BATHIN III ULU	Muara Buat	773,821,570	772,566,000	(1,255,570)
2		Buat	798,183,223	807,029,000	8,845,777
3		Laman Pajang	786,532,350	784,557,000	(1,975,350)
4		Karak Apung	794,141,464	797,169,000	3,027,536
5		Timbolasi	807,770,224	790,728,000	(17,042,224)
6		Senamat Ulu	796,985,264	796,086,000	(899,264)
7		Aur Cino	775,783,472	780,735,000	4,951,528
8		Lubuk Beringin	795,000,000	795,000,000	0

No.	KECAMATAN	DUSUN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH / (KURANG)
1	2	3			
1	LIMBUR LUBUK MENGKUANG	Tanjung Bungo	759,101,224	760,569,000	1,467,776
2		Tuo Lubuk Mengkuang	735,782,981	757,622,000	21,839,019
3		Pauh agung	784,497,263	780,262,000	(4,235,263)
4		Tuo Limbur	770,594,726	753,329,000	(17,265,726)
5		Renah Sungai Besar	765,618,537	757,591,000	(8,027,537)
6		Muara Tebo Pandak	769,025,926	763,317,000	(5,708,926)
7		Rantau Tipu	798,156,716	787,854,000	(10,302,716)
8		Baru Lubuk Mengkuang	766,891,191	762,415,000	(4,476,191)
9		Lubuk Tanah Terban	773,148,425	761,055,000	(12,093,425)
10		Pemunyan	824,363,123	803,771,000	(20,592,123)
11		Renah Sungai Ipuh	781,274,604	764,923,000	(16,351,604)
12		Tebo Jaya	768,552,883	753,833,000	(14,719,883)
13		Sekar Mengkuang	775,003,865	761,694,000	(13,309,865)
14		Limbur Baru	777,855,186	772,227,000	(5,628,186)
SUB-TOTAL			10,849,866,650	10,740,462,000	(109,404,650)
1	JUJAHAN ILIR	Tepian Danto	780,963,886	766,472,000	(14,491,886)
2		Aur Gading	768,205,876	750,659,000	(17,546,876)
3		Pulau Batu	809,172,139	765,527,000	(43,645,139)
4		Bukit Sari	793,883,208	763,753,000	(30,130,208)
5		Sari Mulya	811,854,683	788,659,000	(23,195,683)
6		Lubuk Tenam	770,650,901	760,847,000	(9,803,901)
7		Kuamang	776,255,777	750,271,000	(25,984,777)
SUB-TOTAL			5,510,986,470	5,346,188,000	(164,798,470)
1	RIMBO TENGAH	Sungai Mengkuang	826,590,606	843,319,000	16,728,394
2		Sungai Buluh	758,001,925	759,095,000	1,093,075
SUB-TOTAL			1,584,592,531	1,602,414,000	17,821,469
TOTAL			109,907,883,000	109,907,883,000	-

WABUN BUNGO
H. MASHURI, S.Pd

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

SEKDA KAB. BUNGO
H. H. RIZKI, S.Pd

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR **27** TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN REALISASI PENERAPAN DANA DESA DAN OUTPUT DANA DESA PEMERINTAH DUSUN ...
TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ..
BULAN ...

Pagu Dana Desa (DD) Rp.....

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	PENYALURAN			REALISASI BULAN INI	REALISASI BULAN LALU	JUMLAH REALISASI s.d BULAN INI	SALDO	% CA OU
					NOMOR SP2D	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 + 10	12 = 8 - 11	
1	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- Penyaluran PERTAMA											
	- Penyaluran KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA											
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2.	dst.....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	dst.....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dst.....											
2.4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst.....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Kegiatan											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH											
	(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

Disetujui Oleh,
(Dusun), (tanggal, bulan, tahun)
R/O ...

BUPATI BUNGO,
H. MASHURI